

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING (STUDI KASUS: DESA SUMBUL DUSUN BANTUN KERBO KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA)

**Fitriana Padang, Rustam Pakpahan, Indah Purnama Kaloko,
Rana Lolo Karina Berutu, Siti Afnijar Berutu**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.
*fitrianapadang08@gmail.com, kaloko.purnama@gmail.com, ranakarina20@gmail.com,
sitiafnijarberutu@gmail.com*

Abstract

Stunting is a condition where a child experiences failure to grow and develop due to lack of nutritional intake. The purpose of this study was to examine how the Government's policies in preventing stunting in Sumbul Village, Bantun Kerbo, Lae Parira District, Dairi Regency, North Sumatra. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach, collecting data using direct observation methods to the scene and conducting interviews with local residents, the Head of Sumbul Village and the Head of the Kentara Health Center. From the results of the study, it can be seen that the government has difficulties in implementing stunting prevention policies and the Bantun Kerbo Hamlet achieves the highest number of stunting children in Sumbul Village. Therefore, the role of the government and the policies carried out greatly affect the prevention of stunting.

Keywords: Stunting, Prevention, Policy.

Abstrak

Stunting merupakan kondisi dimana seorang anak mengalami kegagalan tumbuh dan kembang akibat kurangnya asupan gizi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah dalam pencegahan stunting di Desa Sumbul Bantun Kerbo Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi langsung ke tempat kejadian serta melakukan wawancara dengan warga sekitar, Kepala Desa Sumbul dan Kepala Puskesmas Kentara. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam mengimplementasi kebijakan pencegahan stunting dan Dusun Bantun Kerbo mencapai angka tertinggi anak yang mengalami stunting di Desa Sumbul. Oleh karena itu peranan pemerintah dan kebijakan kebijakan yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap pencegahan stunting.

Kata kunci: Mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata, Penggerak, Nilai Keagamaan.

PENDAHULUAN

Gangguan gizi di Indonesia cukup menjadi sorotan permasalahan yang di alami oleh anak balita, dan anak yang memasuki jenjang sekolah SD baik perempuan dan laki-laki. Permasalahan gizi pada anak di tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap potensi dan kualitas yang

rendah.(Sutarto et al., 2018) Balita yang memiliki tinggi badan yang relative pendek merupakan salah satu gejala Stunting. Stunting merupakan suatu permasalahan cukup besar yang menjadi bahan pembicaraan saat ini, bukan hanya Nasional bahkan di Internasional. Pada tahun 2017 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami

stunting, berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan kementerian kesehatan dasar (Riskesdas) menemukan ternyata dari tahun 2007 sampai 2013, jumlah kasus (prevalensi) anak kerdil tetap masih tinggi dan ditemukan adanya lintas sector pemasukan.

Dari nilai Z-score jika tinggi badan dengan umur memperoleh angka < 2 Standar Deviasi (SD) maka anak dikatakan *stunting*. Anak yang terkena stunting dengan anak normal sering kali tidak terlihat secara spesifik. Kekurangan gizi terjadi begitu saja sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku who-mgrs (multicenter growth reference study) 2006. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, stunting dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan langsung dengan tumbuh kembang bayi atau balita seperti pola asuh, pemberian ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, pemberian imunisasi lengkap, kecukupan protein dan mineral, penyakit infeksi, dan genetic. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga, seperti tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering

mengalami sakit. Hal ini menjadi focus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025.

Di Indonesia kasus anak kerdil (stunting) sebenarnya bukan hanya terjadi dan dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh rumah tangga/keluarga yang mampu atau yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dalam data prevalensi balita stunting yang di kumpulkan World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. (Dr.drh.Didik Sutarjo, 2018) Walaupun mengalami penurunan, presentase bila dibandingkan dengan data anak kerdil (stunting) nasional rata-rata 20%. Kasus stunting pada anak balita masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 12 November 2019, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-55. Dalam melakukan penurunan prevalensi stunting dilalui oleh 2 kerangka intervensi yaitu pencegahan (intervensi) gizi spesifik dan pencegahan (intervensi) gizi sensitive. Tujuan dari pelaksanaan kedua intervensi ini yaitu untuk mencapai percepatan dalam pencegahan stunting melalui berbagai kebijakan seluruh OPD evaluasi dilakukan bersama agar mendapatkan hasil yang efektif.

Umumnya kegiatan pencegahan spesifik berada pada bagian kesehatan dan jangkanya pendek sehingga pencapaiannya dapat diperoleh secepat mungkin. Intervensi ini menyumbang

untuk 30% dalam mengurangi kasus stunting. Lain halnya dengan intervensi spesifik, rancangan dalam pencegahan ini dilakukan dengan berbagai cara untuk membangkitkan bidang kesehatan dan menyalurkan sekitar 70% terhadap pencegahan Stunting. Intervensi spesifik yang dilakukan Pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran yaitu :

1. Sasaran ibu hamil dilakukan melalui kebijakan “food nutritional security” pemantauan dan evaluasi
2. Sasaran ibu menyusui dan anak 0-6 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian IMD/inisiasi menyusui dini (pemberian kolostrum asi), memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan asi eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang bayi setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat.
3. Sasaran ibu menyusui yang memiliki anak usia 7-23 bulan melakukan pemberian ASI. Hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping, penyediaan dan pemberian obat cacing, pemberian suplementasi zink, fortifikasi zat besi dalam makanan, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi pencegahan dan pengobatan diare.(Iqbal, 2021)

Sedangkan dalam intervensi sensitive dilakukan melalui program kegiatan seperti; penyediaan air bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi, salah satunya melalui program STBM, penyediaan Jaminan kesehatan nasional, pemberian pendidikan pengasuhan pada

orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini universal oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, keluarga berencana, pemberian edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi remaja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

Pertumbuhan balita adalah masa yang sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukannya perhatian terhadap kecukupan gizi pada anak balita. Stunting termasuk masalah gizi yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan pada balita, yang menimbulkan dampak negatif yang terjadi pada kehidupan selanjutnya seperti menurunnya intelektual, sering terserang penyakit, menurunnya produktivitas hingga menyebabkan kemiskinan dan lahirnya bayi dengan keadaan berat badan rendah. Salah satu faktor penyebab stunting adalah status sosial ekonomi keluarga, seperti penghasilan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi dan jumlah anggota keluarga secara tidak langsung dapat berubungan dengan kejadian stunting. Hasil Riskesdas, menunjukkan bahwa timbulnya stunting dipengaruhi oleh penghasilan dan pendidikan orang tua yang rendah, sehingga kurangnya kepedulian terhadap gizi anak. (Ni'mah & Nadhiroh, 2015)

Penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Penanganan stunting perlu koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat danlainnya. Upaya penanggulangan dilakukan pemerintah melalui intervensi spesifik, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan intervensi sensitif terkait kesehatan lingkungan, penanggulangan

kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan (Rosha et al., 2016) system penanggulangan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan lagi, karenakesabaran masyarakat sangat perlu di kembangkan akan pentingnya gizi seimbang, sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan modal yang besar untuk menekan angka stunting.

Terdapat kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden NO. 42 Tahun 2013 tentang Gizi (GERNAZ PPG) yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019. Dalam hal ini munculnya regulasi tersebut memperhatikan dalam beberapa aspek dan dijadikan ultimatum untuk desa-desa melalui Permenkeu 61/PMK.07/2019, dana desa untuk mendukung pelaksanaan dalam pencegahan stunting yang terintegrasi. (Rahman et al., 2021) Berhubungan dengan itu, maka peneliti mengambil studi kasus di Desa Sumbul Dusun II Bantun Kerbo, untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah stunting yang terjadi.

Maka dalam hal ini permasalahan stunting bukan hanya tanggung jawab kementerian kesehatan saja, namun pemerintah provinsi sampai pemerintah desa sekalipun ikut serta mengambil peran dalam upaya pencegahan kasus stunting ini. Hal ini sangat penting dalam upaya melihat korelasi dan implementasi kebijakan public tentang stunting di desa. Tentunya berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa dana yang digunakan untuk pencegahan stunting relatif kecil, walaupun kasus yang terjadi relative tinggi. Maka dalam hal ini peneliti memfokuskan bagaimana aspek kebijakan yang di lakukan pemerintah dan bagaimana respon masyarakat dalam implementasi di lapangan guna memperoleh solusi yang efektif.

METODE

Metode adalah cara untuk mengkaji sesuatu. Dalam mengkaji mengenai kebijakan pencegahan stunting yang di lakukan oleh Pemerintah Kecamatan Lae Parira terkhusus di Desa Sumbul dalam pencegahan stunting, maka peneliti membutuhkan data yang lebih valid dan actual mengenai konteks tersebut. Maka untuk itu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus dan berlokasi di Desa Sumbul Dusun II Bantun Kerbo Kecamatan Lae Parira. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Deskriptif penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan kemudian di deskripsikan sesuai yang di amati di lapangan.

Instrumen penelitian ini adalah dilakukan melalui proses observasi dan wawancara . Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Sumbul di Kantor Desa dan Kepala Puskesmas secara langsung di Kantor Puskesmas Kentara Kecamatan Lae Parira . Penelitian ini mengumpulkan informasi berupa data primer berupa wawancara yang di lakukan untuk mengetahui informasi ataupun data terkait penanganan stunting yang ada di Dusun Bantun Kerbo. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata yang ada di lapangan sehingga dapat diketahui secara benar apa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program wajib yang di laksanakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan tujuan umum untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat

dalam pengembangan dan peningkatan desa. Mengingat peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, maka peneliti melakukan penelitian mengenai kebijakan pencegahan Stunting di Desa Sumbul Dusun II Bantun Kerbo, Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa terdapat beberapa anak SD yang tubuhnya tidak sesuai dengan usianya. Anak yang terlibat stunting berasal dari kalangan yang memang kurang dari segi ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang informasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus stunting adalah kebijakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas berbentuk penyuluhan. Ada 3 program penyuluhan yang dilakukan yaitu (1) Penyuluhan untuk pemberian vitamin FE, (2) Penyuluhan untuk remaja putri wanita usia subur untuk mempersiapkan kehamilan, dan, (3) Penyuluhan untuk calon pengantin. Cara ini dilakukan di setiap desa ataupun puskesmas, dengan koordinasi dengan petugas desa dalam beberapa bulan sekali, namun penyuluhan untuk ibu hamil dilakukan 3 kali dalam sebulan. Kebijakan ini dilakukan dalam bentuk kelompok yang dinamakan kelas ibu (ibu hamil dan menyusui). Untuk personalnya dilakukan dengan pemeriksaan melalui pendekatan. Implementasi untuk kebijakan stunting ini dilakukan secara kelompok dan personal. Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan adalah jika ditemukannya ibu yang kurang energy kalori maka diberikan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil baik dari puskesmas atau pihak desa. Tujuannya agar Kepala Desa lebih memperhatikan masyarakatnya untuk pencegahan stunting tersebut. Hasil dari

kebijakan ini memiliki perkembangan yang baik dengan dilihatnya dari kegiatan posyandu secara maksimal, dan ibu hamil dapat melahirkan secara normal. Namun dalam hal ini terdapat kendala dalam melakukan kebijakan tersebut yaitu kurangnya respon masyarakat yang baik. Masyarakat di Desa ini lebih memilih sibuk bekerja, yang dimana pekerjaan masyarakat Dusun Bantun kerbo dominan Petani sehingga kurangnya rasa peduli terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak kesehatan. Dalam hal ini sebagian besar masyarakat kurang memiliki pendidikan dan kurangnya ekonomi. Sehingga rasa kepedulian tersebut berkurang dan dapat menyebabkan stunting. Contohnya di salah satu desa di Kecamatan Lae Parira yaitu Desa Simpung Poling. Keadaan di desa tersebut mengenai kesehatan sangat kurang dan memprihatinkan. Hal ini disebabkan faktor pendidikan orangtua yang sangat rendah dan ekonomi yang sulit. Untuk itu, kebijakan yang dilakukan oleh pihak kesehatan adalah memberikan motivasi kepada orangtua untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan mengubah pola pikir ataupun mindset untuk lebih peduli terhadap stunting. Faktor yang mendukung dalam pencegahan stunting ini adalah pendanaan. Setiap desa diberikan 10% untuk anggaran kesehatan baik itu di Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Dikarenakan dana ataupun anggaran yang dikeluarkan oleh pihak desa sangat terbatas, hal ini menjadi salah satu kendala dalam pencegahan stunting di desa ini. Anggaran tersebut tidak hanya untuk pencegahan stunting, namun kegiatan kesehatan lainnya seperti posyandu dan lansia. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung UKBM. Tahun sebelumnya terdapat makanan tambahan yang diberikan untuk kegiatan Posyandu. Program

posyandu menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat desa termasuk untuk anak balita. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mampu berperan aktif dan berpartisipasi, sehingga menyadarkan orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak balita dengan baik. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan untuk mengukur dan memeriksa anak saja, tetapi juga memberikan pola asuh keluarga untuk kesadaran pentingnya kesehatan balita. Namun dalam hal ini selain terbatasnya anggaran yang ada, ternyata sumber daya manusia yang ada juga sangat sedikit.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dusun II Bantun Kerbo, maka dapat disimpulkan bahwa Stunting ini merupakan suatu permasalahan baru yang dialami masyarakat Dusun Bantun Kerbo. Kasus stunting yang terjadi di Dusun tersebut cukup besar. Kebijakan yang dilakukan dari Pemerintah Desa dan pihak Puskesmas adalah diberikannya beberapa penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja putri yang hendak menikah. Dan kegiatan ini dilakukan dengan rutin, namun kendala yang terjadi dalam melakukan kebijakan ini adalah kurangnya dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelem]ncaran dalam melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu penelitian diantaranya Kepala Puskesmas Kentara , Kepala Desa Sumbul, serta masyarakat Desa

Sumbul. Besar harapan kami agar karya tulis ini bisa menjadi referensi bagi anak-anak bangsa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.drh.Didik Sutarjo, M. K. (2018). Situasi Balita Penek (Stunting) di Indonesia. In *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*.
- Iqbal, M. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(2).
- Ni'mah, K., & Nadhiroh, S. R. (2015). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Media Gizi Indonesia*, 10(1), 15–19.
- Rahman, Z., Werenfridus, M., N.R, D. R., Ukhra, A., & M, N. W. (2021). Analisi Kebijakan Pencegahan Stunting dan Relevansi Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Donowarih). *Karta Rahardja*, 2(1), 27–33.
- Rosha, Ch, B., Sari, K., SP, I. Y., Amaliah, N., & Utami, N. (2016). Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita di Kota Bogor. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2), 127–138.
- Sutarto, Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Agromedicine*, 5(1).